

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 3 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebelumnya dinas Pariwisata Kabupaten Aceh tengah bergabung dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata Merupakan Instansi dalam Pemerintahan kabupaten Aceh Tengah yang mempunyai tugas dan Fungsi membantu Bupati Aceh Tengah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai mana tertuang dalam peraturan Bupati Aceh Tengah No 1 Tahun 2020.

Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh tengah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) teknis yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilan perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi. Renstra SKPK merupakan dokumen perencanaan SKPK untuk periode 4 (Empat) tahun, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK serta bersifat indikatif. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renstra terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni; tahap penyusunan rancangan renstra SKPK, tahap rancangan akhir dan tahap penetapan. Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Pariwisata akan terkait dengan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas pariwisata Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034)
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua untuk undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang,
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Korona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan / atau stabilitas sistem Keuangan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Deseases 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagid daerah dengan mas jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan dana bagi hasil migas dan gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah
21. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten aceh tengah.
22. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Penyusunan rencana strategis Dinas pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dimaksudkan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dalam RPD dan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan perubahan RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah 2023 – 2026 adalah:

1. Sebagai acuan/ pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPK dan acuan penyusunan DPA SKPK selama Empat tahun kedepan.
2. Menentukan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dalam mendukung terwujudnya program pemerintah daerah
3. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Dinas Pariwisata sebagai bagian dari Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya DinasPariwisata serta Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DinasPariwisata

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DinasPariwisataTelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu -isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan

Dinas Pariwisata yang mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPK, program lintas SKPK dan program kewilayah disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Pariwisata untuk periode tahun 2023-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPK yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPK dalam Empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DIBIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPK

2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tengah melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

a. tugas

1. Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
2. Kepala dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b. fungsi

1. Mengendalikan Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
2. Pengendalian dan pengorganisasian peyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang.
3. Pengendalian Penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
4. Pengendalian dan pengkoordinasian Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pariwisata dan ekonomi Kreatif.
5. Pengendalian dan pengkoordinasianPenyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidangPariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
6. PengendalianPembinaantekhnis di bidang pariwisata ekonomi Kreatif.
7. Pengendalian dan pengkoordinasianPemenuhan sarana dan prasarana pariwisata, dan ekonomi Kreatif.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pariwisata Ekonomi Kreatif.
9. Melakukan pembinaan terhadap UPTD.
10. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan: dan
11. Melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

a. Tugas

1. Sekertaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelola dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelola urusan Administrasi, umum, peralatan peralatan, kerumahtanggaanm kepegawaian, hukum, perundangundangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkingan dinas Pariwisata,

b. Fungsi

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, Rumah Tangga, barang Inventaris, Aset, perlengkapan, peralatan, Pemeliharaan, dokumentasi dan Perpustakaan.
2. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan Pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan Pembuatan Standar OperasionalProsedur (SOP)pada dinas .
4. Pengelolaan administrasi keuangan.
5. Pelaksanaan Evaluasi, monitoring, dan Pelaporan; dan
6. Melaksanakan Fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

a. Tugas

1. Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan dibidang pengembangan distinasi pariwisata.

b. Fungsi

1. Pengendalian dan Penyusunan Program kerja dibidang penembangandistinasi pariwisata
2. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
3. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan dibidang pengembangadestianasi pariwisata.
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga terakit pengembangan destinasi pariwisata.
5. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan ; dan
6. Melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

a. tugas

1. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pengembangan pemasaran pariwisata.

b. Fungsi

1. Pengendalian dan Penyusunan program kerja dibidang pengembangan Destinasi pariwisata.
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan destinasi pariwisata.
3. Melaksanakan koordinasi dibidang pengembangan Destinasi Pariwisata.
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait pengembangan pengembangan destinasi pariwisata.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

a. tugas

1. Bidang industri pariwisata dan ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang Industri pariwisata dan ekonomi Kreatif.

b. Fungsi

1. Pengendalian dan Penyusunan program kerja dibidang ekonomi kreatif dan Industri Pariwisata.
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri pariwisata.
3. Pelaksanaan koordinasi dibidang Ekonomi Kreatif dan Industri pariwisata.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan indutri / lembaga terkait pengembangan ekonomi Kreatif dam Industri pariwisata.
5. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan.
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oelh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA

2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata memiliki jumlah pegawai sebanyak 52 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, Tenaga Honorer dan Keamanan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah pegawai

No	Pegawai	Jumlah orang
1	PNS	35
2	Kontrak/Honoror	17
Jumlah		52

Tabel 2.2

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan eselon dan jenis kelamin

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1		1
2	Eselon III	3	1	4
3	JabatanFungsional	7	4	11
4	Staf			18

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Sarjana S-2	5 orang	
2.	Sarjana S-1	31 Orang	
3.	Diploma 3	3 Orang	
4.	SLTA sederajat	13 Orang	
5	SMP		
6.	Yang Pernah Mengikuti Diklat PIM		

1. Sarana dan Prasarana

Untukmemperlancarpelaksanaantugas pada Dinas PariwisataKabupaten Aceh Tengah didukungdengansarana dan prasaranasebagaiberikut:

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Status	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Komputer	7	Hak Pakai	Baik
2	Printer	6	Hak Pengelolaan	Baik
3	Filling Kabinet	6	Hak Pakai	Baik
4	Lemari	9	Hak Pakai	Baik
5	Meja Kerja	35	Hak Pakai	Baik
6	Kursi Tangan	18	Hak Pakai	Baik
7	Kursirapat	17	Hak Pakai	Baik
8	Sepeda motor	4	Hak Pakai	Baik
9	Mesinbabat	1	Hak Pakai	Rusak
10	Infokus	1	Hak Pakai	Baik
11	Lemari Rak Kecil	2	Hak Pakai	Baik
12	Sofa Tamu	1	Hak Pakai	Baik
13	Lap Top	4	Hak Pakai	Baik

Tabel 2.5

Data Kunjungan Objek Wisata Unggulan

Nomor	Nama Objek	Jumlah Kunjungan Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Ujung Paking	3,610	4,858	4,704	1,179	1,089
2	Bur Gayo (Grafiti Bur Gayo)	8,897	78,428	80,015	2,460	452
3	Dermaga Wisata Lukup Penalam	1,149	43,911	23,220	21,678	1,845
4	Pante Menye	5,176	5,576	4,281	1,198	2,829
5	Pantan Terong	38,994	100,178	88,975	167,795	2,889
6	Gayo Rafting	-	20,552	19,866	6,513	771
7	Bur Rintis	-	63,234	61,966	63,428	2,644
8	Putri Pukes	5,531	18,151	17,430	2,750	121
9	Pante Gemasih	-	3,082	20,110	4,356	1,056
10	Lung Toweren	-	-	10,351	3,817	297
Jumlah		63,357	337,970	330,918	275,174	13,993

Tabel 2.6
Target Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah

Nomor	Indikator	IKK/IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kunjunga Wisata (BAB *RPJM)		65.00	63.00	65.00	70.00	75.00	65.00
2	Jumlah Kunjunga Wisata		141,212	191,200	241,150	291,000	341,200	341,200
3	Lama Kunjungan Wisata		1	1	2	2	2	2
4	Persentase Objek dan Daya Tarik Wisata Yang dibina		13.4	15	17	18	19	19
5	Persentase Pokok Darwis Yang dibina		20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
6	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata		30.00	30.5	40.00	40.5	50.5	60.5
7	Peningkatan Destinasi Wisata		4.83	6.45	8.65	9.67	11.29	11.29
8	Persentase Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		40.50	50.00	50.50	60.00	60.50	70.00
9	Persentase Jumlah Promosi dan Atraksi Pariwisata		50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.50
10	Persentase Kawasan Wisata		40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00

Tabel 2.7

Target Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah

Nomor	Indikator	IKK/IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kunjunga Wisata (BAB *RPJM)		65.00	63.00	65.00	70.00	75.00
2	Jumlah Kunjunga Wisata		141,212	191,200	241,150	291,000	341,200
3	Lama Kunjungan Wisata		1	1	2	2	2
4	Persentase Objek dan Daya Tarik Wisata Yang dibina		13.4	15	17	18	19
5	Persentase Pokok Darwis Yang dibina		20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
6	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata		30.00	30.5	40.00	40.5	50.5
7	Peningkatan Destinasi Wisata		4.83	6.45	8.65	9.67	11.29
8	Persentase Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		40.50	50.00	50.50	60.00	60.50
9	Persentase Jumlah Promosi dan Atraksi Pariwisata		50.00	60.00	70.00	80.00	90.00
10	Persentase Kawasan Wisata		40.00	50.00	60.00	70.00	80.00

Tabel 2.8
Rincian Penelaahan Indikator Kinerja
Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah

Nomor	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan
1	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Tercapai	0
2	Persentase Laporan Keuangan tepat Waktu	Tidak Tercapai	Kerangnya Kepatuhan Terhadap Penyampaian
3	Jumlah Kunjungan Wisata	Tercapai	Seringnya Ditutup Destinasi Pariwisata
4	Lama Kunjungan Wisata	Tercapai	0
5	Persentase Objek dan Daya Tarik Wisata Yang Dibina	Tercapai	0
6	Persentase Pokdarwis yang dibina	Tercapai	0
7	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata	Tercapai	0
8	Peningkatan Destinasi Wisata	Tercapai	0
9	Persentase Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tidak Tercapai	Baru Terbentuknya Dinas Pariwisata

10	Persentase Jumlah Promosi dan Atraksi Pariwisata	Tidak Tercapai	Tidak Terlaksananya Beberapa E
11	Persentase Kawasan Wisata	Tercapai	0

Berdasarkan Tabel 2.8, dapat disimpulkan isu-isu penting yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah guna mendukung upaya pembangunan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah belum memadai.
2. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan sering terjadi penutupan destinasi pariwisata Kabupaten Aceh Tengah sehingga para wisatawan enggan berkunjung ke tempat tujuan, hal ini juga didasari oleh intruksi pemerintah setempat, pada waktu-waktu tertentu Pemda Aceh Tengah mengintruksikan agar menutup objek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah guna menghindari kerumunan yang dapat mengakibatkan penyebaran Covid-19. Hal ini mengakibatkan beberapa even pada Dinas Pariwisata Tidak dapat terlaksana.

Adapun strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah untuk menangani isu-isu penting dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur yang berkualitas

2. Peningkatan Sistem pelayanan Administrasi
3. Mewujudkan dan Memadukan Pemberdayaan pembangunan pendidikan mental spiritual, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
4. Mewujudkan pemberdayaan Pembangunan sarana dan prasarana
5. Mewujudkan dan memadukan pemberdayaan pembangunan pertanian, Industri pertambangan dan energy, perdagangan dan koperasi serta dunia usaha
6. Mewujudkan Pemberdayaan Pembangunan, Pengelolaan Sumberdaya alam yang berkualitas.
7. Mewujudkan E-Government
8. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan masyarakat pariwisata dalam Kegiatan Masyarakat.

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPK

Demi terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan aparaturinya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya aparaturinya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Pariwisata sangat penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya masyarakat yang

tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan itu pun tergantung juga pada sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2018 - 2022 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2018 - 2022 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

.Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahunke-					Realisasi Capaian Tahunke-					Rasio Capaian pada Tahunke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Persentase Pemenuhan Gaji dan tunjangan ASN							100%	100%				100%		100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah Tenaga Honor Dinas Pariwisata yang digaji							12	12				12		100%	100%	100%		
3	Jumlah Tenaga Pengaman Kantor yang digaji							1 Org	1 Org				1 Org		100%	100%	100%		
4	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerang Bangunan							100%	100%				100%		100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor							100%	100%				100%		100%	100%	100%	100%	
6	Jumlah Minuman Harian ASN							100	100				100			100%	100%		

7	Jumlah BarangCetakan dan Penggandaan							1 Thn	1 Thn					1 Thn			100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangdangan							4 dokum en	4 dokum en					4 dokum en			100%	100%	100%	100%
9	JumlahPenyediaanALat Tulis Kantor							1 Tahun	1 Tahun					1 Tahun			100%	100%	100%	100%
10	PersentasePenyelengga raanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD							20 Kali	20 Kali					20 Kali			100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Jasa Surat Menyurat							100%	100%					100%			100%	100%	100%	100%
12	Jumlah Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik							100%	100%					100%			100%	100%	100%	100%
13	JumlahjasaPelayananu mumkantor							3 Org	3 Org					3 Org			100%	100%	100%	100%
14	Jumlah Jasa PerizinanKenderaan Dinas							4 Unit	4 Unit					4 Unit						
15	Jumah PemeliharaanKenderaa n Dinas OperasionalatauLapangan							4 Unit	4 Unit					4 Unit				100%	100%	100%

16	Persentase pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1	100%	100%				100%				100%
17	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya							100%	100%				100%				100%
18	PERSENTASE PENINGKATAN DESTINASI WISATA							70	70				70		100%	100%	100%
19	Persentase / Jumlah Event Pariwisata yang terlaksana							6 Event	6 Event				6 Event		100%		
20	Persentase Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata							20 Objek	20 Objek				20 Objek		100%		100%
21	Jumlah Perencanaan Destinasi Wisata							4 Destinasi	4 Destinasi				4 Destinasi		100%	100%	100%
22	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata							60%	70%				60%		100%	100%	100%
23	Jumlah Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata							6 Unit	6 Unit				6 Unit				100%
24	PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA							65%	70%				65%		100%	100%	100%
25	Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya							10 Promosi	15 Promosi				10 Promosi				100%
26	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata							19 Objek	19 Objek				19 Objek		100%	100%	
27	Jumlah Penyediaan Data dan							9 Event	10 Event				9 Event		100%	100%	

	Penyebaran Informasi Pariwisata																		
28	Jumlah pemilihan duta Wisata							2 Org	2 Org				2 Org			100%	100%		
29	Jumlah Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan							10 Rencana Aksi	12 Rencana Aksi				10 Rencana Aksi			100%	100%		
30	Jumlah Rencana Aksi Pengembangan Usaha Ekraf							1 Rencana Aksi	1 Rencana Aksi				1 Rencana Aksi			100%	100%		
31	JUMLAH SUMBER DAYA PARIWISATA EKRAF YANG DIKEMBANGKAN							10 Org	10 Org				10 Org					100%	
32	Jumlah Pelatihan / Peran Serta pengembangan kemitraan Pariwisata							10 Peran Serta	20 Peran Serta				10 Peran Serta		100%				
33	Jumlah fasilitas Pemasaran Produksi ekraf							10 Ekraf	15 Ekraf				10 Ekraf		100%				
34	Jumlah Pelatihan Bimtek / Pendampingan Ekonomi Kreatif							20 Ekraf	40 Ekraf				20 Ekraf		100%				
35	Jumlah SDM Kepariwisata yang dilatih							100 Org	120 Org				100 Org			100%	100%		
36	Jumlah tenaga kerja Bidang Pariwisata yang bersertifikasi							1 Naker	2 Naker				1 Naker			100%	100%	100%	
									1 Paket										

Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata

Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	17	18
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4,119,082,348					4,053,980,303					98.42			
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				3,736,816,848	3,736,816,848				3,688,470,916					98.71			
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN				105,600,000	105,600,000				105,000,000					99.43			
3	Pengamanan Barang Milik Daerah				12,000,000	12,000,000				12,000,000					100.00			
4	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik Penerang Bangunan				507,200	5,521,900				507,200					100.00			
5	Persentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga				-	54,450,400												

6	Persentase Pemenuhan Bahan Logistik Kantor				40,612,000	59,400,000			40,573,500					99.91			
7	Persentase Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan				6,000,000	10,409,900			5,998,200					99.97			
8	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2,500,000	1,988,000			-					-			
9	Persentase Pemenuhan Bahan / Material				22,288,000	14,000,000			22,253,300					99.84			
10	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109,532,000	111,582,000			101,614,899					92.77			
11	Persentase Pemenuhan Jasa Surat Menyurat				-	1,353,000											
12	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12,426,300	39,296,400			8,130,488					65.43			
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				28,800,000	48,000,000			28,800,000					100.00			

14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan				5,000,000	7,500,000				4,319,300							86.39
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				30,000,000	51,874,400				29,312,500							97.71
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7,000,000	119,097,500				7,000,000							100.00
17	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				-	72,772,600											
18	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				2,054,760,000	3,144,405,980				2,027,907,950							98.69
19	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota				776,760,000	666,084,900				774,682,100							99.73

20	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota				128,000,000	403,218,980				127,621,200								99.70
21	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota				500,000,000	505,000,000				483,791,000								96.76
22	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota				-	749,987,100												
23	Pengadaan / Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				650,000,000	820,115,000				641,813,650								98.74
24	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				254,855,000	2,104,038,900				251,092,496								98.52
25	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				-	415,836,500												
26	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar				-	796,973,900												

	Negeri PaeriwisataKab upaten / Kota																	
27	Penyediaan Data dan PenyebaranInfo rmasiPariwisata Kabupaten dan kota Baik Dalam dan Luar Negeri					-	139,893,500											
28	PeningkatanKer ja Sama dan KemitraanPariw isatadalam dan Luar Negeri				254,855,000	501,335,000				251,092,496					98.52			
29	PROGRAM PENGEMBANG AN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATA N DAN PERLINDUNGA N HAK KEKAYAAN ITELEKTUAL					-	125,000,000											
30	PenyusunanRe ncana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif					-	125,000,000											
31	PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				550,000,000	2,127,119,40 0				547,470,576					99.54			

32	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					-	462,168,900										
33	Pasilitasi Proses Kreasi/Produksi Distribusi/ Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif					-	431,350,000										
34	Pelatihan, bimbingan teknis dan Pendampingan ekonomi Kreatif						33,600,500										
35	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (mahasiswa dan / atau siswa					500,000,000	500,000,000			499,799,200				99.96			
36	Sertifikasi Kompetensi/agen/akerja Bidang Pariwisata					50,000,000	50,000,000			47,671,376				95.34			
37	Pengembangan Kompetensi SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					-	650,000,000							-			

Meskipun demikian, mengingat tantangan bidang pariwisata Aceh 4 (*Empat*) tahun ke depan semakin berat yang menyangkut dengan isu-isu modernisasi, kemajuan teknologi dan pasar global serta tuntutan sarana/prasarana pariwisata yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan wisatawan, maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan bidang pariwisata yang dilakukan secara profesional dan proporsional dengan memberdayakan seluruh potensi daerah, seperti SDA, SDM dan keanekaragaman pariwisata dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait dan berpedoman pada Qanun Aceh tentang Kepariwisataan Aceh dan RIPPDA Aceh melalui prinsip “*pro syariah, pro job, pro-growth, pro poor dan pro lingkungan*”.

Keberpihakan dan alokasi anggaran yang memadai dari berbagai sumber, seperti APBA, dan APBK sangat diharapkan, tidak hanya untuk membiayai seluruh program prioritas bidang pariwisata Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan isu strategis, namun juga untuk mencapai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.

Dinas

Pariwisata mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, namun demikian dalam menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut merupakan tantangan dan dapat menjadi pembelajaran serta peluang untuk dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah

Bentuk **tantangan** pelayanan Dinas Pariwisata yang dihadapi antara lain :

1. Masih kurang optimalnya Pelayanan Investasi serta pembinaan pengelolaan sektor pariwisata
2. Masih lemahnya regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Masih kurangnya akselerasi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wisata bahari dan agrowisata seni dan budaya
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kedatangan wisatawan sebagai peluang jangka panjang, sehingga sebagian masyarakat hanya mengambil keuntungan sesaat, sehingga mendapat penilaian kurang baik dan berdampak bagi kelangsungan pengembangan jangka panjang
5. Sebagai daerah destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan,

berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban daerah dan pencedar narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya

Adapun **Peluang** dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, pada kurun waktu 4 (Empat) tahun yaitu 2023 sampai dengan 2026 dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

1. Branch image positif bagi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah
2. Adanya peningkatan promosi melalui berbagai media
3. Tumbuhnya industri Ekonomi kreatif berbasis iptek dan potensi lokal.

Untuk menjawab tantangan di atas, maka Dinas Pariwisata, akan berperan mengkoordinasikan dan merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang yang menjadikan komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata
- Masih rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, pada tahun 2016 rata-rata lama tinggal wisatawan baru mencapai 1 hari.
- Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan pengembangan kampung wisata;
- Kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata termasuk jasa perhotelan
- Masih rendahnya kontribusi sektor wisata terhadap PAD
- Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan Dinas Pariwisata dipengaruhi oleh Faktor-faktor *internal* dan *eksternal* Dinas Pariwisata faktor internal yang mempengaruhi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah antara lain : 1. Masih belum memadainya Kuantitas, Kualitas dan

kapasitas aparat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan beban kerja yang makin meningkat. 2. Belum maksimalnya hasil koordinasi karena lemahnya pemahaman Tupoksistaf. 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah adalah :

1. Status lahan objek wisata belum memiliki dokumen yang jelas dan belum terdaftar dalam asset daerah
2. Ragam usaha dan kegiatan kepariwisataan masih terbatas
3. Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata belum optimal
4. Promosi dan pemasaran objek dan daya tarik pariwisata masih terbatas
5. Kreativitas masyarakat dalam menciptakan produk kerajinan yang berwawasan ekonomi kreatif masih rendah
6. Persepsi negatif terhadap pariwisata oleh kelompok masyarakat tertentu
7. Lemahnya koordinasi antar lintas sector
8. Ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata masih terbatas, seperti: *akomodasi, restoran, angkutan wisata, souvenir, money changer, travel biro, pramuwisata.*
9. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antar kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di

rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1.1 Belum optimalnya jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata	1.1.1 Masih terbatasnya akses dan sarana transportasi untuk menuju kawasan destinasi utama
		1.2 Masih rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, pada tahun 2016 rata-rata lama tinggal wisatawan baru mencapai 1 hari	1.1.1 Masih minimnya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan destinasi pariwisata
		1.3 Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan pengembangan kampung wisata;	1.1.2 Terbatasnya sarana akomodasi, kuliner dan sofenir di kawasan destinasi wisata
		1.4 Kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata termasuk jasa perhotelan	1.1.3 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam bidang pariwisata sebagai tuan rumah maupun sebagai pelaku wisata
		1.5 Masih rendahnya kontribusi sektor wisata terhadap PAD	1.1.4 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam bidang pariwisata sebagai tuan rumah maupun sebagai pelaku wisata
		1.6 Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata	1.1.5 Kurangnya minat pelaku usaha dalam mengembangkan industri

	yang berbasisekonomikreatif	kreatifteknologiinformasimaupunprodukkarya seni dan budayainovatif
--	-----------------------------	--

3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TERPILIH

Tugas fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah adalah menjalankan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Adapun visi, misi yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Aceh Tengah yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi adalah Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdayasaing.

Sasaran RPJM meningkatnya pendayagunaan Potensi Pariwisata dengan Strategi Peningkatan Promosi dan Citra Pariwisata. Dalam Rangka pencapaian sasaran tersebut maka Dinas Pariwisata menjalankan program peningkatan Daya Saing kepariwisataan dengan didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata**, diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata melalui pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan, peningkatan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas.

Pengembangan industri pariwisata antara lain meliputi peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa wisata.
- 2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata** diarahkan untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara melalui promosi wisata.

3. Pengembangan kelembagaan Pariwisata, diarahkan untuk membangun organisasi kepariwisataan berikut SDMnya yang Kompeten, kredibel, dan Inovatif serta komunikatif melalui;

- Optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan wisata
- Peningkatan kompetensi tenaga kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi
- Pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan ditingkat nasional dan internasional.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Berdasarkan penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai acuan untuk bidang pariwisata yang ada di takengon, arah rencana strategis pengembangan pariwisata Indonesia bertujuan untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdayasaing di pasar internasional, Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya, Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif, Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktivitas maksimal.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup, baik yang berskala lokal, regional, ataupun nasional bahkan lintas negara, dan tidak cukup memadainya Instrument AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrument yang berskala regional sampai Internasional pada tataran strategis. Instrument ini kemudian populer dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagaimana tahap inisiasi pada umumnya kegiatan yang terkait dengan pemikiran KLHS ini masih lebih dikonsentrasikan pada studi dan pengenalan dengan kata lain kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai kegiatan KLHS seutuhnya sehingga dapat dikatakan masih "Nearly SEA".

Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada tataran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument KLHS ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumus tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang ada.

Sesuai dengan perannya masing-masing, maka KLH, Bappenas, dan Depdagris semakin instentif bekerja untuk merumuskan KLHS ini sebagai satu instrument

nasional dan regional. Bahkan KLHS initalahdiupayakanuntukmenjadipeganganutamadalammerumuskansetiap strategi pembangunanberikut monitoring dan evaluasinya, baikdalamkontekskiwilayahanmaupunsektoral. Dengandemikian KLHS adalahbentukindakanstrategikdalammenuntun, mengarahkan dan menjamin agar tidakterjadi efeknegatifterhadaplingkungan dan berkelanjutan, dipertimbangkansecaraInherendalamkebijakan, rencana dan program.

Adapun peran KLHS dalamperencanaan tata ruangadalah KLHS bisamenentukanSubstansi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Bisa dimanfaatkansebagai Instrument metodologispeleengkap (Komplementer) atautambahan (Subplemeter) daripenjabaran RTRW, atakombinasidaribeberapaatausemuafungsi-fungsidiatas. Penerapan KLHS dalampenataanruang juga bermanfaatuntukmeningkatkanEfektifitaspelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolahanlingkunganlainnya, dan menciptakan tata pengaturan yang lebihbaikmelalupembangunanketerlibatan para pemangkukepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerjasama, lintas batas wilayah administrasisertamemperkuatpendekatankesatuanekosistemdalam satuan Wilayah.

Selanjutnya, tujuan KLHS dalampenataanruangyaitu :

1. Mengidentifikasipengaruhataukonsekuensi dari RTRW terhadaplingkunganhidupsebagaiupayauntukmendukung proses pengambilankeputusan.
2. MengintegasikanpertimbanganlingkungankedalamSubtansi RTRW.
3. Memperbaharuimutu dan proses formulasisubtansi RTRW.

4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi.
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan dayadukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

Dari

uraian tersebut di atas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat lajunya penurunan kualitas lingkungan dan dayadukung lingkungan. Oleh karena itu diperlukan penghitungan dayadukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur / proses dan metodologi / muatan perencanaan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Bidang Pariwisata

Pengembangan Agrowisata

Potensi pariwisata perlu dikembangkan untuk peningkatan jumlah kunjungan wisata domestic dan mancanegara. Hal ini dapat berpengaruh kepada penerimaan slidaerah dan pendapatan bagi masyarakat pelaku usahapariwisata. Hal penting yang harus dibenahi adalah pengelolaan objek wisata secara professional dan mendapat dukungan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mendukung pencapaian Program yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Program yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (Empat) tahun. Dengan tujuan ini Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumberdaya organisasi. sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Aceh Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJM	Target Capaian Satuan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM
					2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata		Spending of Money wisatawan	%	35,54	40,00	46,20	51,67	54,75	60,00	
2.		Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Spending of Money wisatawan	Rp	N/A	N/A	20	25	30	40	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata, Kabupaten Aceh Tengah dalam lima tahun mendatang merupakan tahapan lanjutan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, yang selaras dengan strategi dan kebijakan rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Aceh Tengah. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bagaimana cara Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RKPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dan merupakan bagian dari program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Untuk mengetahui strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Investasi, Pendayagunaan potensi Pariwisata dan Pendapatan Daerah	Peningkatan Promosi dan citra Pariwisata	Meningkatnya Pengelolaan Objek Wisata
			Meningkatnya Pengembangan Usaha dan Jasa wisata
			Peningkatan Citra pariwisata halal

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang akan diuraikan di atas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut:

1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan Program dan mengembangkan Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/*Strenght* (S)

1.) Tersedianya Anggaran Untuk Pengembangan pariwisata.

2.)

Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang Pengembangan Pariwisata.

3.) Tersedianya teknologi informasi dalam pengembangan Pariwisata.

Kelemahan/*Weakness* (W)

1.) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

2.) Belum optimalnya pengelolaan manajemen keuangan daerah yang berdampak terhadap pelaksanaan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah

3.) Belum optimalnya penataan sumber daya aparatur sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki yang berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah

4.) Belum optimalnya pendistribusian potensi sumber daya aparatur

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/*Opportunity* (O)

1.) Menduniannya Agrowisata kopi Aceh Tengah

2.) Brand image positif bagi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah

3.) Adanya peningkatan promosi melalui berbagai media

4.) Tumbuhnya industri kreatif berbasis iptek dan potensi lokal.

5.) Adanya peningkatan aktifisasi seni dan budaya melalui even di dalam maupun di luar daerah.

b. Ancaman/*Treaths* (T)

1.) Masih kurang optimalnya pembinaan pengelolaan sector kepariwisataan

2.)

Masih lemahnya regulasi untuk pengembangan pembangunan sector pariwisata sesuai dengan tataran wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

3.)

Masih rendahnyakesadaran masyarakat dalam menyikapik kedatangan wisatawan sebagai peluang jangka panjang, sehingga sebagian masyarakat hanya mengambil keuntungan sesaat, sehingga mendapat penilaian kurang baik dan berdampak bagi kelangsungan pengembangan jangka panjang

4.) Sebagai daerah destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban daerah dan pencedarannya arkaotik dan obat-obatan terlarang lainnya

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan sertamaksud (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien,

halinimemberikangambaranbahwaprogram
adalahcarauntukmencapaitujuandansasaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pariwisata tahun 2023s.d tahun 2026 adalah sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata,
Kabupaten Aceh Tengah

Tujuan	Sasaran	kode	program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata				Indeks Pengembangan Potensi Pariwisata												
	Meningkatnya lama tinggal wisatawan			Persentase meningkatnya Spending of Money wisatawan												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Manajemen Pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan		84.50	3.268.384.673	89.00	3.366.436.213	89.00	3.464.487.753	93.50	3.562.539.293	93.50	13.661.847.931	Dinas Pariwisata,

			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 Dok	50.000.000.	100 Dok	50.000.000	100 Dok	50.000.000	100 Dok	50.000.000	100 Dok	200.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah		8 Dok	35.000.000	8 Dok	35.000.000	8 Dok	35.000.000	8 Dok	40.000.000	8 Dok	145.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000		40.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000		20.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	2.848.176.432	100	2.848.176.432	100	2.891.610.972	100	2.893.569.612	100	11.481.533.448	
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35 Org/Bln	2.848.176.432	35 Org/Bln	2.848.176.432	35 Org/Bln	2.891.610.972	35 Org/Bln	2.893.569.612	35 Org/Bln	11.481.533.448	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													

			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000		120.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	204.654.445	100	229.254.445	100	243.654.445	100	264.235.445	100	264.235.445	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.999.150	1 Paket	4.999.150	1 Paket	4.999.150	1 Paket	6.999.150		21.996.600	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.304.095	1 Paket	5.304.095	1 Paket	5.304.095	1 Paket	5.304.095		21.216.380	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	3.313.200	1 Paket	3.313.200	1 Paket	3.313.200	1 Paket	6.413.200		16.352.800	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	54.450.000	1 Paket	54.450.000	1 Paket	54.450.000	1 Paket	64.450.000		227.800.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1.519.000	1 Paket	4.999.150	1 Paket	4.999.150	1 Paket	4.000.000		15.517.300	

			Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	JumlahDokumenBahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan		1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000		8.000.000	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	33.069.000	1 Paket	35.069.000	1 Paket	35.069.000	1 Paket	35.069.000		140.276.000	
			PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD		1Laporan	100.000.000	50Laporan	110.000.000	50Laporan	124.000.000	50Laporan	140.000.000		474.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			22.5	40.000.000	45	80.000.000	67.5	140.000.000	90	165.000.000	90	425.000.000	
			PengadaanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas OperasionalatauLapangan yang Disediakan		2 Unit	20.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	35.000.000	2 Unit	100.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Jumlah Unti Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Disediakan		10 Unit	20.000.000	10 Unit	55.000.000	10 Unit	120.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	325.000.000	
			Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerah				50.577.396		50.577.396		50.794.396		56.294.396		208.243.584	

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JumlahLaporanJas a Surat Menyurat		2 Lapora n	1.783.000	2 Lapora n	1.783.000	2 Lapora n	2.000.000	2 Lapora n	3.500.000		9.066.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporanPe nyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lapora n	19.994.396	12 Lapora n	19.994.396	12 Lapora n	19.994.396	12 Lapora n	24.951.540		84.934.728	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahLaporanPe nyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Lapora n	28.800.000	Lapora n	28.800.000	Lapora n	28.800.000	Lapora n	28.800.000		112.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah			100	74.976.400	100	88.427.940	100	88.427.940	100	128.439.840	100	380.272.120	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak KendaraanPeroran gan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	JumlahKendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan DibiayaiPajaknya		4 Unit	5.000.000	4 Unit	6.500.000	4 Unit	6.500.000	4 Unit	6.500.000	4 Unit	24.500.000	4 Unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan PerizinanKendaraa n Dinas OperasionalatauLa pangan	JumlahKendaraan Dinas OperasionalatauLa pangan yang Dipelihara dan DibayarkanPajakn ya dan Perizinannya		4 Unit	49.988.100	4 Unit	49.988.100	4 Unit	49.988.100	4 Unit	53.000.000	4 Unit	202.964.300	4 Unit

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	1 Unit	24.951.540	1 Unit	24.951.540	1 Unit	30.951.540	1 Unit	95.854.620	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	4.988.300	1 Unit	6.988.300	1 Unit	6.988.300	1 Unit	37.988.300	1 Unit	56.953.200	1 Unit
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN DESTINASI WISATA	2 Hari	780.449.901	3 Hari	803.863.396	3 Hari	827.276.895	3 Hari	850.690.392	3 Hari	3.262.280.586	
	Kegiatan		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota		20.43	165.000.000	34.41	165.000.000	48.39	165.000.000	63.44	165.000.000	63.44	660.000.000	
			Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	6 Lokasi	100.000.000	8 Lokasi	100.000.000	10 Lokasi	100.000.000	12 Lokasi	100.000.000		400.000.000	
			Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	2 Dok	50.000.000	3 Dok	50.000.000	4 Dok	50.000.000	5 Dok	50.000.000		200.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	2 Dok	15.000.000	3 Dok	15.000.000	4 Dok	15.000.000	5 Dok	15.000.000		60.000.000	
	Kegiatan		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			480.449.901		503.863.398		527.276.895		550.690.392		1.540.280.586	

			Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota		2 Dok	200.000.000	3 Dok	200.000.000	4 Dok	200.000.000	5 Dok	200.000.000		800.000.000
			Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten Kota Yang dikembangkan		1 Kawasan	142.875.000	2 Kawasan	142.875.250	2 Kawasan	145.947.500	2 Kawasan	149.983.750		581.681.500
			Pengadaan / Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Strategis Kabupaten Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten Kota		6 Unit	100.000.000	8 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	12 Unit	100.000.000		142.875.000
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten Kota		Laporan	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000
	Kegiatan		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota				135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		540.000.000
			Penyediaan layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota		20 Dok	10.000.000	20 Dok	10.000.000	20 Dok	10.000.000	20 Dok	10.000.000		40.000.000
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota		20 Dok	25.000.000	20 Dok	25.000.000	20 Dok	25.000.000	20 Dok	25.000.000		100.000.000

			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000		200.000.000	
			Fasilitas standar industri dan Usaha Pariwisata			20 Unit Usaha	50.000.000	20 Unit Usaha	50.000.000	20 Unit Usaha	50.000.000	20 Unit Usaha	50.000.000		200.000.000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase perturbanwisman dan wisnus yang datang ke daerah		10.21	467.875.000	10.21	481.911.250	10.21	495.947.500	15.00	509.983.750	15.00	1.955.717.500	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri		47.71	467.875.000	60.00	481.911.250	80.42	495.947.500	96.88	509.983.750	96.88	509.983.750	
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		15 Dok	200.000.000	20 Dok	204.000.000	20 Dok	205.000.000	30 Dok	205.000.000	35	814.000.000	
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri		1 Dok	142.875.000	1 Dok	142.875.250	1 Dok	145.947.500	1 Dokok	149.983.750	1 Dok	581.681.500	
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten Kota		2 Dok	100.000.000	4 Dok	105.036.000	8 Dok	115.000.000	10 Dok	120.000.000	10 Dok	120.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		10 Dok	25.000.000	15 Dok	30.000.000	20 Dok	30.000.000	20 Dok	35.000.000	20 Dok	35.000.000	

			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif		3	598.550.000	4	616.506.500	5	634.463.000	6	652.419.500	6	2.501.939.000	
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			19.26	598.550.000	30.09	616.506.500	53.52	634.463.000	82.87	652.419.500	82.87	2.501.939.000	
			Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan		2 Dok	75.000.000	3 Dok	82.956.500	4 Dok	82.956.500	5 Dok	82.956.500	5 Dok	82.956.500	
			Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif		1 Unit	98.550.000	2 Unit	108.550.000	3 Unit	108.550.000	3 Unit	108.550.000	3 Unit	108.550.000	
			Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif		10 Laporan	125.000.000	20 Laporan	125.000.000	30 Laporan	125.000.000	40 Laporan	125.000.000	40 Laporan	500.000.000	
			Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		5 Dok	100.000.000	6 Dok	100.000.000	8 Dok	107.956.500	10 Dok	107.956.500	10 Dok	107.956.500	
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atau Hak Cipta dan Hak Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Industri Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		3 Dok	100.000.000	6 Dok	100.000.000	8 Dok	110.000.000	9 Dok	110.000.000	9 Dok	420.000.000	
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		3 Dok	100.000.000	7 Dok	100.000.000	8 Dok	100.000.000	9 Dok	100.000.000	9 Dok	100.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN	JUMLAH SUMBER DAYA		1.0	246.250.000	1.1	253.637.500	1.2	261.025.000	1.3 Org	268.412.500	1.3 Org	1.029.325.000	

			SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PARIWISATA EKRAF YANG DIKEMBANGKAN												
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			41.88	246.250.000	59.76	253.637.500	77.65	261.025.000	92.00	268.412.500	92.00	268.412.500	
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang dikembangkan Kompetensinya		10 Org	50.000.000	15 Org	50.000.000	20 Org	50.000.000	25 Org	61.305.000	25 org	61.305.000	
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		25 Org	50.000.000	30 Org	50.000.000	35 Org	50.000.000	40 Org	50.000.000	40 Org	100.000.000	
			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (mahasiswa dan / Atau Siswa)	Jumlah Orang Yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (mahasiswa dan / Atau Siswa)		10 Org	50.000.000	15 Org	50.000.000	20 Org	50.000.000	25 Org	50.000.000	25 Org	200.000.000	
			Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja Bidang Pariwisata		25 Org	25.000.000	30 Org	25.000.000	35 Org	25.000.000	40 Org	25.000.000	40 Org	100.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber		5 Dok		10 Dok	25.000.000	15 Dok	25.000.000	17 Dok	25.000.000	17 Dok	100.000.000	

			Kreatif	Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			25.000.000									
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			50	21.250.000	60	28.637.500	70	36.025.000	80	28.637.500	80	28.637.500	
			Pelatihan, Bimbingan Tekhnis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Yang Pelatihan, Bimbingan Tekhnis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		25 Org	25.000.000	30 Org	25.000.000	35 Org	25.000.000	40 Org	25.000.000	40 org	100.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau non kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan.

.Penentuan Kelompok Sasaran Kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator Kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi.

Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada

saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPK dengan pemerintah. SKPK akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKj) tahunan dan LKj lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja SKPK merupakan ukuran keberhasilan untuk mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode Tahun 2023-2026 yang secara rinci diuraikan pada tabel di bawah ini.

kkkk

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SARAN	TARGET INDIKATOR KERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkan Kesejahteraan Masyarakat dalam industry Pariwisata.	Meningkatkan Investasi Pendayagunaan Potensi Pariwisata dan Pendapatan Daerah	Indekspengembangan potensipariwisata,	65,00	63,00	65,00	70,00	75,00	65,00
		Meningkatnya efektifitas dan efesisensi kinerja perangkatdaerah	Nilai SAKIP	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00
			SKM	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00
		Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	Lamanya Kunjungan Wisata	2	2	3	3	2	2
			Persentase Pokdarwis yang dibina	13	15	17	18	19	19
			Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana	30,00	30,00	40,00	40,00	50,00	60,00
		Meningkatnya Pem asaran Pariwisata	Persentase kawasan Wisata yang bertaraf internasional	40	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
			Jumlah Kunjungan wisata	141,212	191,200	241,150	291,000	341,200	341,200
			Persentase jumlah promosi dan atraksi pariwisata	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	95,00
		Meningkatnya Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata	Peningkatan Brand Destinasi Wisata	4,83	6,45	8,65	9,67	11,29	11,29

			Persentasi Jumlah Promosi dan Ekonomi Kreatif yang dibina	40,5	50,00	50,5	60,00	60,5	70
			Persentase Pengembangan SDM Ekraf	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00
			Persentase Kawasan wisata	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
			Persentase Pembinaan Permodalan dan Pemasaran				60,00	70,00	80,00
			Persentase Fasilitas HKI, hubungan antar Lembaga dan wilayah				60,00	70,00	80,00

BAB VIII

PENUTUP

Dinas Pariwisata Aceh Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Pariwisata Aceh Tengah sesuai dengan amanah PERMENDAGRI Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan-Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Aceh Tengah sebagai dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Aceh Tengah untuk Periode 4 (*Empat*) tahun mencakup materi Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Aceh Tengah berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (*RPJM*) Aceh Tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Aceh Tengah Tahun 2023-2026 ini disusun dengan melibatkan seluruh unsure terkait, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan penjabaran secara tekni soperasional setiap tahunnya melalui dokumen Rencana Kerja(*RENJA*) Dinas Pariwisata Aceh Tengah sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Aceh Tengah Tahun 2023-2026 secara optimal, diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Dinas Pariwisata Aceh Tengah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun para pelaku pariwisata/ akademisi dan para tokoh masyarakat lainnya.

Keterpaduan, kerjasama, keterbukaan, komitmen dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Aceh Tengah juga sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan upaya yang sinergis dalam mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Aceh Tengah Tahun 2023-2026.

Terakhir perlu diperhatikan juga oleh SKPK Dinas Pariwisata untuk sungguh-sungguh memperhatikan tujuan dan sasaran dalam program sertakegiatan SKPK guna mendukung pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang akan dicapai dalam 4 Tahun kedepan sesuai waktu RPJMD Kabupaten Aceh Tengah upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagiandan proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Juga merupakan langkah penunjang keberhasilan pemerintahan yang ada. Terimakasih.

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN ACEH TENGAH



ZULKARNAIN, SE, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19660406 199703 1 002